

ASHOBIYAH IBN KHALDUN: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia

Asrul Muslim
Jurusan Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan filsafat UIN Alauddin
Alamat: Makassar

Abstrak

Ibn Khaldun adalah sosok yang sangat teliti dalam melihat fakta-fakta sosial di masyarakat. Teori ashobiyah Ibn Khaldun adalah teori yang mengungkapkan tentang siklus sebuah perjalanan panjang sebuah kelompok sosial mulai dari tingkat keashobiyahan yang tinggi sampai lunturnya keashobiyahan yang menyebabkan kehancuran sebuah pemerintahan. Konsep khaldunian merupakan konsep yang dapat melihat aspek perubahan yang ada di dalam sebuah kelompok sosial.

Key words; *Ashobiyah Ibn Khaldun dan Konsep Perubahan Sosial*

A. Pendahuluan

Perubahan mutlak terjadi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk yang bersifat dinamis. Perubahan yang terjadi pada manusia ada yang berimplikasi progres namun tidak sedikit pula yang berimplikasi regres. Senang ataupun tidak senang, maka perubahan itu akan menimpa seluruh aspek kemasyarakatan. Tidak terkecuali perubahan yang terjadi di dalam sebuah negara, yang tentunya akan mempengaruhi segala aspek dari kehidupan bernegara.

Ibn Khaldun, seorang Ilmuwan Muslim mengkaji berdasarkan fakta-fakta yang ada disekitarnya, mengeluarkan teori bahwa sebuah negara kemungkinan akan mengalami perubahan yang signifikan setelah berjalan sekitar 120 tahun dengan siklus yang terjadi setiap 40 tahun. Teori tersebut selanjutnya lebih dikenal sebagai konsep Ashobiyah. Sudah tentu teori ini selanjutnya dapat diuji keakuratannya terhadap perkembangan-perkembangan dari sebuah negara yang ada di dunia ini. Ashobiyah Ibn Khaldun dalam perkembangannya dikenal dengan istilah Khaldunian. Akankah teori tersebut merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan, atau bahkan menakutkan ataukah teori tersebut perlu disadari sebagai sebuah *warning* bagi seluruh elemen bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini.

Berdasarkan teori Ashobiyah Ibn Khaldun tersebut maka, bangsa Indonesia yang telah merayakan kemerdekaan sejak tanggal 17 Agustus 1945, perlu mewaspadaikan akan kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun dalam Ashobiyah Ibn Khaldun tersebut, atau mungkin teori ashobiyah tersebut telah menggejala di negara Indonesia yang tercinta ini atau bahkan mungkin teori tersebut tidak berlaku di Indonesia.

Adapun Poko permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep Ashobiyah Ibn Khaldun hubungannya dengan perubahan sosial di Indonesia saat ini?

B. PEMBAHASAN

I. Konsep Ashobiyah Ibn Khaldun

a. Sejarah Singkat Ibn Khaldun

Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 atau bertepatan dengan 1 Ramadhan 732 H. Beliau terlahir dengan nama dengan nama Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan. Keluarganya berasal dari Hadramaut (sekarang wilayah Yaman) dan silsilahnya sampai kepada seorang sahabat Nabi Muhammad saw bernama Wail bin Hujr dari kabilah Kindah. Dalam beberapa sumber orang tuanya kemudian menetap di Sevilla, Spanyol. Selain mempelajari Al-Qur'an dan Tajwid, beliau juga mempelajari kaidah-kaidah Bahasa Arab dan Turunannya seperti hahwu, sharaf, balagah, dan ushul fiqhi. Berbekal ilmu-ilmu tersebut beliau dapat menafsirkan al-Qur'an dan mampu memaknai hadis-hadis Rasulullah. Tidak itu saja, Ibn Khaldun juga menguasai fisika dan matematika. Khaldun mulai masuk ke dunia politik dan pemerintahan para pemimpin tunis hijrah ke Maroko. Pada tahun 1350 M (751 H), dalam usia 21 tahun, ia diangkat menjadi sekretaris Sultan dinasti Hafsi. Sejak saat itu lika-liku kehidupan dan karir politiknya mengalami pasang surut sampai pada tahun 1374 M (776 H) dia mengundurkan diri dari dunia politik. Ia menyepi ke daerah Qal'at Ibnu Salamah dan menetap disana sampai tahun 1378 M (780 H). Disinilah ia mengarang kitab monumentalnya berjudul "*Kitab al-'ibar wa Diman al_mubtada' wa al-Khabar fi 'Ibar*" (sejarah umum). Kitab setebal 7 jilid ini berisi kajian sejarah, yang didahului dengan Muqaddimah (jilid 1) yang berisi pembahasan tentang problematika sosial manusia (sosiologi). Kitab Muqaddimah itu sendiri pada akhirnya berhasil menjadi pembuka jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial manusia.

Ibn Khaldun wafat di Kairo 25 Ramadhan 808 H / 19 Maret 1406. Temuan pentingnya adalah mengenai konsepsi sejarah serta konsep sosiologisnya yang hingga sekarang masih dijadikan bahan utama referensi bagi seluruh ahli sejarah dan sosiologi di Dunia.¹

b. Konsep Ashobiyah Ibn Khaldun

Maju-mundurnya suatu masyarakat bukan disebabkan keberhasilan atau kegagalan sang Penguasa, atau akibat peristiwa kebetulan atau takdir, demikian teori yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun, ia lebih menekankan bahwa aspek solidaritas sosial yang lebih berperan dalam perubahan sosial.

He speaks of what he calls Al-Asbiyah (Vitality of state or dynasty), that is to say, the power and influence of the tribe or family, based, as he considers, on family and similarities. This power belongs to those who enjoy the ashobiyah, and then the power extend to five or six, but in a state of decline and weakness. Ashobiyah, and consequently power, comes to an end with the dissolution or noble lineage and goes to another tribe or family which enjoys the privilege of number and force, and so on. The object of ashobiyah is sovereignty. Here Ibn Khaldun speaks of the characteristic or sovereignty, the difference or its kinds and extent in accordance with the nation where it rises, the effect of conquest on the conquered nation, who are generally fond of imitating the conquer. ²

Hal ini tentu sangat berbeda dengan pandangan beberapa pemerhati sosial seperti Plato, Kong Fu Tse, dan lain sebagainya yang mengemukakan bahwa perubahan sosial yang terjadi disebabkan oleh pemegang posisi sentral, yaitu para penguasa.

Ibn Khaldun memandang bahwa sebuah bangsa mengalami metamorfosis sebanyak tiga kali dan setiap tahapan metamorfosis tersebut membutuhkan waktu 40 puluh tahun, sehingga sebuah bangsa dari lahir hingga kehancurannya membutuhkan waktu 120 tahun. Tahapan metamorfosis tersebut adalah; *pertama*, masa dimana sebuah bangsa memiliki tingkat ashobiyah yang kuat untuk berusaha membentuk sebuah bangsa, mereka berada dalam keadaan masyarakat primitive, dan mereka hidup jauh dari gemerlap kehidupan kota. *Kedua*, adalah tahapan keberhasilan dari sebuah tingkat ashobiyah yang kuat mampu 'merebut' sebuah bangsa dari usaha tersebut mereka kemudian mengalami kehidupan yang jauh dari keadaan primitive. Mereka dalam kemewahan atas usaha yang telah mereka lakukan sebagai hasil dari ashobiyah yang kuat. *Ketiga*, adalah tahapan dimana bangsa yang mereka 'rebut' dengan ashobiyah yang kuat, mengalami kehancuran karena kehidupan mereka yang telah melupakan semangat ashobiyah disebabkan kemewahan, perasaan takut kehilangan berbagai fasilitas hidup mewah.³ Dengan melihat tinggi-rendahnya kadar 'ashobiyah di atas, Khaldun menggolongkan masyarakat atas dua bagian. *Pertama*, masyarakat Badawah atau Baduwi, dan *kedua*: masyarakat hadharah atau berperadaban tinggi yang identik dengan masyarakat kota. Yang *pertama* merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, 'ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. Akan halnya masyarakat *kedua*, ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. 'Ashobiyah dan konsepsi Ibn Khaldun tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan.

Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbisa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

Sedangkan masyarakat Badui, mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di 'kendalikan' daripada masyarakat kotayang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.⁴

Berdasarkan teori 'ashobiyah, Ibn Khaldun membuat teori tentang tahapan timbul tenggelamnya suatu Negara atau sebuah peradaban menjadi lima tahap, yaitu: *Pertama*; Tahap sukses atau tahap konsolidasi, dimana otoritas negara didukung oleh masyarakat ('ashobiyah) yang berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti sebelumnya. *Kedua*; Tahap tirani, tahap dimana penguasa berbuat sekehendaknya pada rakyatnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin negara senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikut. Penguasa menutup pintu bagi mereka yang ingin turut

serta dalam pemerintahannya. Maka segala perhatiannya ditujukan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya. *Ketiga*; Tahap sejahtera, ketika kedaulatan telah dinikmati. Segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara. *Keempat*; Tahap kepuasan hati, tentram dan damai. Pada tahap ini, penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para pendahulunya. *Kelima*; Tahap hidup boros dan berlebihan. Pada tahap ini, penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas hawa nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya.⁵ Tahap-tahap itu menurut Ibnu Khaldun memunculkan tiga generasi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu: Generasi Pembangun, 2. Generasi Penikmat. 3. Generasi yang tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara⁶.

Jika suatu bangsa sudah sampai pada generasi ketiga ini, maka keruntuhan negara sebagai sunnatullah sudah di ambang pintu, dan menurut Ibnu Khaldun proses ini berlangsung sekitar satu abad. Ibn Khaldun juga menuturkan bahwa sebuah Peradaban besar dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan dan penuh perjuangan. Keinginan hidup dengan makmur dan terbebas dari kesusahan hidup ditambah dengan 'Ashobiyah diantara mereka membuat mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mereka dengan perjuangan yang keras. Impian yang tercapai kemudian memunculkan sebuah peradaban baru. Dan kemunculan peradaban baru ini pula biasanya diikuti dengan kemunduran suatu peradaban lain. Tahapan-tahapan di atas kemudian terulang lagi, demikian seterusnya hingga teori ini dikenal dengan Teori Siklus.

Pandangan yang serupa pernah pula dikemukakan oleh sosiolog Emile Durkheim dengan menyatakan bahwa keteraturan sosial dapat tercipta karena adanya solidaritas. Solidaritas menurut beliau terbagi menjadi dua jenis yaitu *pertama*, solidaritas mekanik yaitu solidaritas yang terbentuk karena adanya toleransi terhadap perasaan-perasaan yang sama, semangat religi yang kuat, dan tidak berorientasi pada kebutuhan satu individu terhadap individu lainnya. Sehingga hal ini tidak dapat ditukar dengan materi yang ada. *Kedua*, solidaritas organik, yaitu solidaritas yang timbul karena adanya perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan jika mereka terpisah karena sesuatu hal maka hal itu menjadi lumrah terjadi. Hal tersebut disebabkan karena hubungan mereka hanya berdasarkan kebutuhan semata tidak berdasarkan perasaan.⁷

B. Perubahan sosial dalam Konteks Khaldunian di Indonesia

1. Pengertian Perubahan Sosial

Para sosiolog telah merumuskan pengertian tentang perubahan sosial agar tidak terdapat kerancuan dalam memahami makna perubahan sosial. Di antara sosiolog yang telah merumuskan pengertian perubahan sosial adalah sebagai berikut:

a. Astrid Susanto mengemukakan bahwa perubahan atau perkembangan masyarakat dalam arti positif dan negatif⁸

b. Robert H. Lauer menyatakan bahwa perubahan sosial adalah sebuah konsep inklusif yang mengarah kepada perubahan gejala-gejala sosial dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat, mulai dari individu masyarakat sampai kepada kehidupan masyarakat secara global.⁹

c. Gillin dan Gillin menyatakan bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik perubahan itu disebabkan

karena perubahan geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun disebabkan oleh difusi kebudayaan, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.¹⁰

d. Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh sosiolog tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat manusia merupakan masyarakat yang dinamis, selalu akan mengalami perubahan, baik perubahan itu sifatnya signifikan dilihat dari banyaknya yang dapat melihat ataupun merasakan, maupun perubahan yang sifatnya lambat yang mungkin hanya akan diketahui jika dilakukan sebuah penelitian terhadap objek yang dianggap berubah tersebut. Ada pula perubahan yang sengaja direncanakan, dan adapula yang terjadi begitu saja tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat pula terjadi terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola organisasi, susunan lembaga dalam masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, hubungan-hubungan kemasyarakatan lainnya. Sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi tatanan hidup masyarakat secara global.

2. Konsep Khaldunian dalam Konteks Keindonesiaan

Teori Ashobiyah Ibn Khaldun yang selanjutnya dikenal dengan Khaldunian banyak menjadi rujukan sosiolog untuk melihat tingkat keashabiyaan dari berbagai permasalahan termasuk permasalahan kenegaraan. Demikian halnya di Indonesia, konsep khaldunian banyak menjadi perhatian beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Khaldunian Bangsa Indonesia dalam Konteks Desa-Kota

Pandangan Ibn Khaldun terhadap sebuah masyarakat adalah keberadaan dua kelompok sosial yaitu kelompok Badui yaitu kelompok yang memiliki tingkat ashobiyah yang kuat namun kehidupan mereka sangat bersahaja. Dan ada kelompok sosial lain yang tingkat ashobiyahnya sedikit renggang, yang ia namakan Hadharah, yaitu kelompok masyarakat yang tingkat peradabannya telah maju. Jika di kalangan sosiologi barat seperti Ferdinand Tonnies, mengemukakan kelompok tersebut sebagai *Gemeinschaft (community)* atau Paguyubuan yang diikat oleh ikatan kekeluargaan, atau ikatan primordialisme lainnya, untuk penamaan bagi masyarakat Badui dan *Gessellschaft (society)* patembayan yang diikat dengan ikatan akad atau perjanjian misalnya perusahaan atau pemerintahan, untuk masyarakat Hadarah.¹² Hubungan tersebut didasarkan atas kepentingan dan wilayah.¹³

Jika dilihat dari konteks keindonesiaan maka, apa yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun, dapat digambarkan sebagai masyarakat Desa, (bukan kelurahan) bagi kaum Badui dan Hadarah digambarkan sebagai masyarakat kota. Namun demikian ternyata kehidupan warga negara Indonesia keashobiyahan telah sedikit bergeser baik di kalangan masyarakat desa, meskipun belum semua aspek kehidupannya, yang hampir segala aktifitas dinilai dengan materi. Terlebih terhadap masyarakat kota.

Lunturnya keashobiyahan tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yang paling banyak mempengaruhi adalah tuntutan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh bagi masyarakat di sebagian besar desa yang banyak dipengaruhi oleh kebutuhan

ekonomi, maka batasan-batasan kekeluargaan hanya dapat dilihat dari beberapa aspek saja, misalnya kegotongroyongan menghadapi upacara-upacara adat. Akan tetapi pada sisi lain kegotongroyongan di dalam kegiatan-kegiatan semisal kerja bakti telah luntur, kegiatan seperti tersebut telah beralih dengan sistem balas jasa.

Jika melihat dari konteks keashobiyahan, maka masyarakat seperti yang ada di Masyarakat Indonesia saat ini telah beradar dalam level masyarakat penikmat. Masyarakat yang telah melupakan hubungannya dengan negara.

Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa tingkat nasionalisme yang masyarakat terhadap negaranya telah luntur. Simbol-simbol kenegaraan tidak lagi menjadi "sakral" dikalangan masyarakat pada umumnya. Artinya keashobiyahan masyarakat telah mengalami kelunturan. Terlebih lagi bagi masyarakat kota yang tuntutan pemenuhan kebutuhan kehidupan jauh lebih tinggi dari masyarakat desa.

Keadaan lain yang memicu lunturnya keashobiyahan masyarakat di Indonesia adalah diberikannya kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Hal ini sebenarnya sangat baik untuk pengembangan daerah. Akan tetapi disisi lain, hal tersebut memunculkan "raja-raja kecil" di daerah dengan beralih atas nama pemerintah. Sehingga tidak jarang hasil dari sebuah pemilihan memunculkan konflik horizontal di masyarakat. Tentu hal tersebut sangat menghacurkan keashobiyahan di daerah-daerah tertentu. Belum lagi pemberian otonomi khusus kepada beberapa daerah yang ujung-ujungnya dapat memberikan peluang kepada daerah-daerah tersebut untuk melakukan sebuah referendum untuk menentukan bentuk dari daerahnya sendiri.

Berdasarkan konsep khaldunian, keadaan seperti hal tersebut adalah gejala akan "kehancuran" sebuah generasi. Dan akan menghasilkan generasi baru yang lahir dari kegelisahan banyak orang sehingga memunculkan gerakan yang diawali dengan tingkat keashobiyahan yang tinggi untuk membentuk generasi baru yang lebih baik pada awalnya. Kehancuran sebuah generasi menurut penulis tidak mutlak adalah kehancuran total sebuah bangsa atau negara. Akan tetapi bisa saja merupakan kehancuran sebuah rezim yang berkuasa. Entah hal tersebut terjadi di tingkat pedesaan ataupun pemerintahan yang sifatnya lebih luas. Selain itu masa yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun untuk kehancuran sebuah bangsa atau rezim menurut penulis, tidak mutlak harus menempuh priode 140 tahun pada setiap generasinya. Terlebih bangsa Indonesia memiliki cara yang konstitusional untuk menurunkan seorang pemimpin yang menjadi sebuah simbol dari sebuah rezim.

Wallahu 'alam bissawab

b. Khaldunian dalam Konteks Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, Agama.

1). Konteks Sosial Budaya

Kebudayaan yang pada hakekatnya adalah suatu upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepadanya pada setiap tahap kemandirian perkembangannya, memberi ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu mengkaji kemandirian tersebut. Proses membentuk sosok baru dari suatu konsep budaya, yang dianggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat.¹⁴

Contoh kongkrit adalah kearifan lokal bangsa Indonesia sedikit banyaknya telah mengalami pergeseran akibat derasnya arus globalisasi melalui media massa, baik elektronik maupun media cetak. Hal tersebut berakibat generasi muda saat ini

cenderung untuk menganggap bahwa budaya modern adalah ketika mereka mampu berpenampilan layaknya 'artis', entah dari pakaian, gaya bicara, style rambut bahkan aksesoris yang ada pada idola mereka yang sifatnya kebarat-baratan. Mereka seperti enggan lagi mengenakan pakaian yang tetap 'layak' untuk bangsanya sendiri. Tidak adanya larangan bagi generasi muda untuk meniru-niru atau bahkan tidak adanya atau tidak maunya generasi mengambil tauladan dari orang-orang yang telah pantas diidolakan dari mereka-mereka yang telah 'berhasil' menyebabkan mereka semakin jauh meninggalkan budaya mereka sendiri. Sehingga jati diri bangsa Indonesia, utamanya aspek budaya telah dihadapkan pada budaya materialistik, sekularistik, hedonistik, dan bahkan atheistik¹⁵.

Jepang sekalipun adalah negara yang maju dari berbagai sektor, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal mereka sehingga, mereka banyak dijadikan sebagai rujukan negara-negara timur yang masih mempertahankan kearifan lokal mereka sendiri.

Dari konsep khaldunian keadaan yang demikian merupakan gambaran bahwa ashobiyah dari para pemberi tauladan dan yang akan diberikan arahan-arahan mempunyai jarak yang lebar. Usaha yang keras untuk meningkatkan ashobiyah merupakan tugas kita bersama agar konsep sosial budaya tetap dalam koridor yang diharapkan.

2). Sosial Ekonomi

Anggapan pemerintah Indonesia yang mengklaim bahwa tingkat kemiskinan telah dapat ditekan, merupakan hal yang menggembirakan. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa masih banyak penduduk yang taraf ekonominya jauh dari kata layak. Kehidupan di kolong jembatan atau di pemukiman-pemukiman yang jauh dari kata layak, memberikan gambaran nyata bahwa kemiskinan masih banyak ditengah-tengah masyarakat.

Usaha pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dengan mengeluarkan kebijakan berobat gratis, tidak secara otomatis membuat masyarakat terlayani secara maksimal. Dapat disaksikan bahwa banyak pasien-pasien dalam kategori tidak mampu 'tertolak' untuk berobat, sehingga media massa mengangkat *head line* di media mereka dengan slogan "Orang Miskin dilarang Sakit".

Pemberian Bantuan Langsung Tunai atau BLT, yang merupakan kebijakan lain pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ibarat memberi ikan kepada nelayan, padahal seharusnya tidak demikian. Bantuan Langsung Tunai tersebut telah membuat masyarakat malas untuk berbuat. Alangkah lebih bijaknya jika pemerintah memberikan bantuan berupa skill yang sesuai dengan kondisi geografis dari masyarakat setempat.

Relatif banyaknya orang miskin di Indonesia, maka tidak mengherankan jika muncul banyak konflik yang bermuara pada ketimpangan ekonomi. Misalnya konflik antar etnis di Makassar pada era sekitar tahun 1997 antara etnis pribumi (Bugis-Makassar) dengan etnis Tionghoa, banyak yang beranggapan disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, meskipun pemicunya bukan dari masalah ekonomi. Selain itu berdasarkan pengamatan, daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan, konflik horizontal sering kali terjadi. Sangat berbeda dengan daerah-daerah yang berlabel perkampungan elit tingkat konflik horizontalnya relatif lebih rendah.

Selain itu semakin menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan di tengah-tengah pemukiman masyarakat, telah memberikan andil yang cukup besar terhadap matinya

usaha-usaha kecil di sekitar pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Pemilik modal dapat dengan mudahnya mendirikan tempat usahanya tersebut secara bebas. Meskipun aturan yang ada, super maket memiliki syarat yang ketat untuk didirikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masih perlu dipertanyakan keseriusannya.

Jika dilihat dari konsep khaldunian, maka usaha pemerintah tentu tidak dapat dipandang sebelah mata, akan tetapi usaha yang lebih untuk dapat menekan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat yang dalam kategori miskin.

3). Sosial Politik

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan dan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk dapat mengeluarkan pendapat. Hal itu menyebabkan bangsa Indonesia menjadi negara yang multi partai.

Beranekaragamnya partai di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Partai berideologi Nasionalis
- b) Partai berideologi Agamis
- c) Partai berideologi Nasionalis Agamis

Hal yang menarik untuk dikaji adalah banyaknya partai-partai yang berbasis Islam, sebutlah misalnya PKS, PPP, PBB dan masih banyak partai-partai kecil Islam lainnya menunjukkan bahwa solidaritas ummat Islam dalam sebuah partai Islam yang satu agaknya sulit tercapai dengan terkotak-kotaknya ummat Islam dalam dalam banyak partai berbasis Islam. Jawaban politis yang muncul dari para elit partai Islam adalah dengan banyaknya partai Islam maka keterwakilan ummat Islam akan lebih banyak. Akan tetapi jika pertnyaaan itu dibalik, jika seandainya partai Islam bersatu tidakkah konstituen dari umat Islam yang fanatik tentu tidak akan berfikir lagi partai mana yang harus dipilihnya.

Keberadaan partai-partai berbasis Islam jika dilihat secara mendalam benar atau tidaknya menunjukkan keegoisan dari kalangan elit partai untuk menghimpun orang-orang yang se ideologi dengan mereka. Hal ini tentu dikalangan umat lain dapat membaca peta kekuatan partai-partai Islam berdasarkan partai-partai yang ada.

Konsep khaldunian memandang keberadaan banyaknya partai-partai menunjukkan bahwa tingkat solidaritas dikalangan masyarakat semakin menipis dengan terpecahnya masyarakat ke dalam partai-partai yang mereka dukung. Keadaan yang demikian menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal ketika dalam sebuah pertarungan politik terdapat pihak yang kalah dan menang.

4). Agama

Menjamurnya organisasi-organisasi keagamaan utamanya organisasi Islam (karena Islam Mayoritas di Indonesia) dalam berbagai bentuk dan aksi, yang bergerak secara sporadis dan parsial¹⁶, telah memberikan warna tersendiri terhadap nuansa keislaman. Semua organisasi Islam tersebut berusaha untuk menegakkan norma-norma atau nilai-nilai yang sesuai dengan Agama Islam. Sehingga tidak jarang memunculkan gerakan-gerakan radikal secara aksi yang melanggar nilai dan norma hukum yang berlaku. Termasuk munculnya gerakan-gerakan yang diberi label teroris kepada kelompok yang menggunakan identitas atau simbol-simbol Islam juga banyak bermunculan.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa perbedaan-perbedaan itu bermunculan, bukankah Islam telah diturunkan dari satu Tuhan dan diteruskan oleh

seorang Rasul. Sarifuddin mengemukakan bahwa konsep *khairah ummah* dalam Al-Qur'an mendorong kesatuan umat secara umum dengan tetap mengedepankan rasio serta terorganisir dengan baik, tetapi *khairah ummah* juga merupakan manifestasi untuk menuju masyarakat yang ideal secara universal dengan menerima keberagaman dalam kesatuan. Artinya Islam tetap membuka diri untuk berinteraksi dengan komunitas lain secara produktif,¹⁷ baik dalam komunitas internal Islam atau di luar komunitas Islam.

Menilik dari konsep khaldunian, maka usaha maksimal untuk menciptakan persatuan dalam perbedaan pemahaman keberagaman mutlak harus diusahakan dengan tetap mengedepankan konsep rasional. Bukankah Al-qur'an sendiri telah banyak menantang umat manusia untuk lebih menggunakan rasio dalam memahami ajaran-ajaran-Nya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Ibn Khaldun adalah sosok yang sangat teliti dalam melihat fakta-fakta sosial di masyarakat.
2. Teori ashobiyah Ibn Khaldun adalah teori yang mengungkapkan tentang siklus sebuah perjalanan panjang sebuah kelompok sosial mulai dari tingkat keashobiyahan yang tinggi sampai lunturnya keashobiyahan yang menyebabkan kehancuran sebuah pemerintahan.
3. Konsep khaldunian merupakan konsep yang dapat melihat aspek perubahan yang ada di dalam sebuah kelompok sosial.

Endnotes

¹ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Cet.I; Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008),h. 7 -8

² Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun His life and Work*, (Cet. I; NewDelhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979) h. 114

³ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Cet.I; Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008),h. 117-118

⁴ *Op.cit.* h.117-118

⁵ . *op cit*, h. 214

⁶ . *op.cit*, h. 205

⁷ Doyle Paul Jhonson, dalam Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia,1986) h. 182

⁸ Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*.(Cet. I; Bandung: Binacipta, 1985) h. 157.

⁹ . Robert H. Lauer dalam Judistira K Garna. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. (Cet. III; Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. 1992) h. 8.

¹⁰ Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Cet. VII; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010). h. 263.

¹¹ Selo Soemardjan, *Social Changes in Yogyakarta*, 1962, diterjemahkan oleh H.J. Koesoemanto, Mochtar Pabottingi,(Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1990) h. vii

¹² J. Clyde Mitchell at.al, *Modern Sociology Introductory Readings*, (Cet. I; England; Penguin Books Ltd,1979),h. 409

¹³ J. Dwi Narwoko & Bagong Sunyoto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*,(Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 32.

¹⁴ Umar Kayan, *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 145.

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif “Kemerdekaan dan Masa depan Indonesia” dalam Tim BALITBANG PGI, *Meretes Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia, Theologia Religionum*,(Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia. 2000), h, 218.

¹⁶ KH. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Cet. I; Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994),h.162.

¹⁷ Syarifuddin Jurdi, *Ilmu Sosial Nusantara Memahami Ilmu Sosial Integralistik*,(Cet.I; Yogyakarta; LABSOS UIN Sunan Kalijaga, 2011), h. 189-190

DAFTAR PUSTAKA

Enan. Mohammad Abdullah, *Ibn Khaldun His life and Work*, (Cet. I; NewDelhi: New Taj Offset Press Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1979)

Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Cet. VII; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010)

Jhonson. Doyle Paul, dalam Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia,1986)

Jurdi. Syarifuddin, *Ilmu Sosial Nusantara Memahami Ilmu Sosial Integralistik*,(Cet.I; Yogyakarta; LABSOS UIN Sunan Kalijaga, 2011)

_____, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*.(Cet. I; Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Kayan.Umar, *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994)

Khaldun. Ibn, *Mukaddimah*, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, (Cet. XII; Jakarta, Pustaka Firdaus,2009)

Lauer. Robert H. dalam Judistira K Garna. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. (Cet. III; Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. 1992)

Maarif. Ahmad Syafii “Kemerdekaan dan Masa depan Indonesia” dalam Tim BALITBANG PGI, *Meretes Jalan Teologi Agama-Agama di Indonesia, Theologia Religionum*,(Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia. 2000)

Mahfudh. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Cet. I; Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994)

-
- Mitchell. J. Clyde at.al, *Modern Sociology Introductory Readings*, (Cet. I; England; Penguin Books Ltd,1979)
- Narwoko. J. Dwi & Bagong Sunyoto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*,(Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Susanto. Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*.(Cet. I; Bandung: Binacipta, 1985).
- Soemardjan.Selo, *Social Changes in Yogyakarta, 1962*, diterjemahkan oleh H.J. Koesoemanto, Mochtar Pabottingi,(Cet.III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1990)